

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ACEH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LHOKSEUMAWE



Laporan Kinerja

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....1

BAB I PENDAHULUAN.....2

 A. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe2

 B. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe2

 C. Moto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe.....Error! Bookmark not defined.

BAB II PERENCANAAN KINERJA3

 A. Rincian Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama tahun 2024:3

 B. Penjelasan Butir Sasaran Strategis dan IKU5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA10

 A. Capaian Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe..10

 1. Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 202310

 2. Target dan Realisasi Nilai Kinerja Organisasi Tahun 202413

 3. Analisis Realisasi dan Capaian di Tahun 2024.....15

 4. Analisis Upaya Keberhasilan Serta *Extra Effort* Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja.....18

 5. Analisis Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko Tahun 2024 dan Tahun 202518

 B. Realisasi Anggaran19

BAB IV PENUTUP22

Lampiran23

BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe merupakan kantor pelayanan pajak pratama yang dibentuk dan beroperasi dalam rangka pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dasar Hukum pembentukan KPP Paratama Lhokseumawe adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor:67/PMK.01/2008 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-159/PJ/2008 tanggal 4 September 2008 dan PMK-29/PMK.01/2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal di DJP.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe merupakan Unit Eselon III dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 146, Kota Lhokseumawe. Terdapat satu unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di bawah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe yaitu KP2KP Lhoksukon. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe meliputi Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe per 31 Desember 2024 sejumlah 16.930 Wajib Pajak. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe termasuk KP2KP Lhoksukon berjumlah 74 orang pegawai. Target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 719.090.227.000

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan, sebagaimana visi dan misi kantor yaitu:

A. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe

Menjadi Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe

- 1 Memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak dan Pemangku kepentingan berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
- 2 Mengembangkan inovasi pelayanan perpajakan dan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bida
- 3 Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka mengamankan penerimaan pajak;
- 4 Mewujudkan wilayah bebas korupsi serta birokrasi bersih dan melayani.

C. Moto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe

Selain itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe juga memiliki moto layanan yaitu SALEUM. Selalu Ada Layanan Efektif dan Efisien Untuk Masyarakat. Beserta tag line kantor “Sukses, Berprestasi, Berkah

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rincian Perjanjian Kinerja Pelayanan Pajak Pratama Tahun 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	16%	45%	45%	73%	73%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	16%	45%	45%	73%	73%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%

04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%

9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

B. Penjelasan Butir Sasaran Strategis dan IKU

1. 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak
- Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).
- Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.
2. 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
- Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
- a. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
- b. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas
3. 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
- Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

4. 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh.

5. 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

6. 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan

pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- a. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- b. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- c. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

7. 4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain:

- a. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP; dan
- b. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang

bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

8. 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2023).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

9. 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

10. 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

11. 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

12. 7a-CP Tingkat Efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%)
- e. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

13. 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggu Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- a. Variabel tindakan penagihan (50%);
- b. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%);
- c. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%).

14. 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

15. 8a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

16. 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP.

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2023.

17. 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

18. 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- a. pelayanan perpajakan;
- b. pengawasan kepatuhan;
- c. pemeriksaan pajak;
- d. penagihan pajak.

19. 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko diperoleh dari rata-rata Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Persentase Penerapan Manajemen Risiko pada UPR.

20. 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe

1. Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	128,01%	120%	100,00%	104,75%	104,75%
1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,00%	64,40%	64,40%	100,00%	118,72	118,72%
Customer Perspective							20,00%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	113,57%	113,57%	100,00%	102,07%	102,07%
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	145,54%	120%	100,00%	104,96%	104,96%

3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi						
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	89,10%	89,10%	100,00%	102,03%	102,03%
Internal Process Perspective							25,00%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif						
4a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,40%	120%	70,00%	84,00%	120%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	80	90,79	113,49%	81	85,87	106,01%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif						
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	106,75%	118,61%	90,00%	117,61%	120%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif						
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120%	120%	100,00%	120%	120%
6b-N	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak	100,00%	125%	120%	100,00%	119,42%	119,42%
6c-N	Persentase penyampaian IDLP	100,00%	200%	120%	-	-	-
7	Penegakan hukum yang efektif						
7a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40,00%	59,21%	120%	-	-	-

7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,74%	120%	75,00%	88,99%	118,65%
7c-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%	110,12%	120%	80,00%	98,89%	120%
7c-N	Presentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	-	-	-	80,00%	100,00%	120%
8	Data dan Informasi yang berkualitas						
8a-CP	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	120%	120%	100,00%	152,71%	120%
8b-CP	Presentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	55,00%	88,06%	120%
Learning & Growth Prespective							25,00%
9	SDM yang kompeten						
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	75,00%	93,68%	120%	87,00%	98,18%	112,85%
10	Organisasi yang berkinerja tinggi						
10a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90,00%	100%	111,11%	90,00%	108%	120%
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	95,06	111,84%	85	96,24	113,22%
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	99,47	110,52%	-	-	-

11	Pengelolaan Keuangan yang optimal						
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50%	94,66%	99,12%	100,00%	93,66%	93,66%
Nilai Kinerja Organisasi				107,18%			110,57%

2. Target dan Realisasi Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30.00%	103,21
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							103,21
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100,25%	Max	E/L	26%	57,78.00%	100,25
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	107,26	Max	P/L	19%	42,22%	107,26
Customer Perspective							20.00%	102.98
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,70
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100,25%	Max	E/L	26%	57,78%	100,25
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	113,18%	Max	P/L	19%	42,22%	113,18
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,26
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100,26%	Max	E/M	21%	100.00%	100,26
Internal Process Perspective							25.00%	117,63
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,89
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88,80%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00%	111,77%	Max	E/M	21%	50.00%	111,77
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	120,00%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119.78

6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33,33%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	119.42
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	119,34%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,34
7	Penegakan hukum yang efektif							112,48
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	119,22%	Max	P/M	14%	26.92%	119,22
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	104,47%	Max	P/L	19%	36.54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	Max	P/L	19%	36.54%	100.00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	42.42%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	89,31%	Max	P/L	19%	57.58%	120.00
Learning & Growth Perspective							25.00%	115,82
9	SDM yang kompeten							111,64
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,26	Max	P/M	14%	33,33%	117,26
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,79	Max	P/M	14%	33,33%	109,17
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,66	Max	P/M	14%	33,33%	108,51
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	120,00	Max	P/M	14%	100.00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,93

3. Analisis Realisasi dan Capaian di Tahun 2024

Secara nominal, penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe mengalami kenaikan target. Pada tahun 2023 ditetapkan target sebesar Rp. 589.886.583.000 menjadi sebesar 719.090.227.000 pada tahun 2024. Realisasi penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 720.888.824.678 sehingga surplus sebesar 1.798.597.678 atau 0,25% dari target yaitu sebesar Rp. 719.090.227.000.

Adapun penjelasan terkait masing-masing IKU sebagai berikut :

1. 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Melihat dari data Mandor DJP untuk realisasi IKU ini KPP Pratama Lhokseumawe telah mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar 100,25% atau sebesar 720.888.824.678 dari target yang telah ditetapkan yaitu 100% atau sebesar 719.090.227.000. Capaian ini menunjukkan bahwa terdapat surplus yaitu sebesar 1.798.597.678 atau 0,25% dari target yang sudah diberikan.

2. 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Melihat dari data Mandor DJP, untuk IKU Pertumbuhan penerimaan pajak bruto realisasi KPP Pratama Lhokseumawe berada di angka 107,26% yang mana indeks capaian surplus sebesar 7,26% dari target yang ditentukan yaitu 100%

3. 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Berdasar data dari Mandor DJP total target dari Strategis dan Kewilayahan tahun 2024 sebesar 656.581.618.000 yang sebelumnya di tahun 2023 adalah sebesar 545.968.498.000 dan realisasi sebesar 658.219.768.070 maka capaian berada di angka 100,25% yang mana melebihi target yang ditetapkan .

4. 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Berdasar data dari Mandor DJP realisasi IKU ini mencapai 113,18% yang terdiri dari 2.063 SPT Badan, 36.695 SPT OPK, dan 4.114 SPT OPNK. Capaian ini menunjukkan bahwa ada surplus yaitu 13,18% dari target yang sudah diberikan.

5. 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Berdasar data dari Mandor DJP realisasi dari IKU ini berada di angka 100,26% yaitu sebesar 62.669.056.608 dengan target yang ditentukan yaitu 100% atau sebesar 62.508.056.608.

6. 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
Berdasar data dari Mandor DJP realisasi IKU ini berada di angka 88% dengan target yang ditentukan sebesar 74%. Realisasi tersebut terdiri dari rasio kegiatan sebesar 18,50%, rasio perubahan perilaku bayar sebesar 42,18%, dan perubahan perilaku lapor sebesar 28,12%.
7. 4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan
Data diambil dari ND-2396/WPJ.25/2024 perihal Penyampaian Hasil dan Laporan Survei serta Permintaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2024, realisasi IKU ini berada di angka 111,77% yang mana realisasi ini melebihi target yang ditentukan yaitu di angka 100%.
8. 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa
Berdasar data dari Mandor DJP, capaian persentase pengawasan pembayaran masa mencapai 120% dengan realisasi 120% yang terdiri atas 60% realisasi strategis dan, 60% realisasi pengawasan. Sedangkan target yang telah ditentukan adalah sebesar 90%.
9. 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
Berdasarkan data dari Mandor DJP, realisasi dari IKU P4dk mencapai 120% yang menunjukkan bahwa IKU P4dk surplus 20% dari target yang sudah ditentukan yaitu 100%.
10. 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
Berdasar data yang diambil dari Mandor DJP realisasi IKU ini mencapai 120% yang terbagi atas pemanfaatan data STP dengan persentase STP sebesar 120% dan pemanfaatan data matching dengan persentase data matching sebesar 120% yang mana capaian melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 100%.
11. 6c-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
IKU ini terdiri dari Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu, Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan dan Presentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Berdasarkan data yang diambil dari Mandor DJP, Aplikasi Portal P2 dan Dasboard Rapor Kinerja realisasi IKU ini mencapai 119,34% yang mana capaian melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 100%.
12. 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
Untuk IKU Tingkat efektivitas pemerikksaan, terdiri atas komponen tingkat efektivitas pemeriksaan 120% dan komponen tingkat efektivitas penilaian 115% sehingga capaian realisasi KPP Pratama Lhokseumwe berada di angka 119.22% dari target 100%.
13. 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan
Berdasar data yang diambil dari aplikasi Pegasus, Tingkat efektivitas penagihan mencapai 104,47% yang terdiri atas efektivitas tindakan penagihan sebesar 55,67%, tindak lanjut DSPC sebesar 12,80%, dan pencairan DSPC sebesar 36% sehingga capaian Tingkat efektivitas penagihan mencapai 139,29% (capaian maksimal : 120%) dari target yang ditentukan yaitu sebesar 75%.

14. 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Data diambil dari ND-2662/WPJ.25/2024 tentang Realisasi IKU Presentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Aceh bahwa realisasi berada di angka 100%.

15. 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Data diambil dari Mandor DJP dan laporan realisasi persentase penyelesaian laporan pengamatan. Untuk data KPDL realisasi berada di angka 173,51% sedangkan tidak terdapat laporan pengamatan. Sehingga perhitungan reralisasi untuk IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan ini adalah 173,92% melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 100%.

16. 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

ILAP merupakan seluruh pemerintah daerah provinsi dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah masing-masing kanwil DJP. Realisasi IKU tersebut diambil dari data yang dikelola oleh seksi penjaminan kualitas data, dan IKU ini berhasil mencapai realisasi 89,31% diatas target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 55%.

17. 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Data diambil dari hasil penilaian yang diturunkan dari pusat melalui email kepala kantor. IKU ini memiliki proporsi 50% dari pejabat yang lulus assessment, pelaksana dan fungsional yang lulus ujian kompetensi dan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai dan 50% pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Sehingga IKU ini mencapai realisasi sebesar 117,26 melebihi target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 100.

18. 9b-N Indeks penilaian integritas unit

Data ini turun dari kantor pusat berupa hasil Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU). Survei ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada Wajib Pajak (eksternal) yang menggunakan layanan yang diberikan oleh KPP Pratama Lhokseumawe. Berdasar hasil SPIU, indeks realisasi IKU tersebut menyentuh di angka 92,79 melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 85.

19. 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen Risiko

IKU ini terdiri dari indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dengan bobot 41.50 dan indeks implementasi manajemen risiko dengan bobot 48.6 dan capaian pada KPP Pratama Lhokseumawe mencapai di angka 97,66 dari target 90.

20. 10a-N Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Berdasarkan data dari Aplikasi Monev Kemenkeu, indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Lhokseumawe mencapai angka 99,88 dari nilai kinerja perencanaan anggaran 100 dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 99,76. Nilai ini membawa KPP Pratama Lhokseumawe menduduki peringkat 1 pada laporan realisasi anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Aceh.

4. Analisis Upaya Keberhasilan Serta Extra Effort Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

- a. IKU Penerimaan pajak yang optimal
 - 1) Yang pertama melakukan kegiatan intensifikasi, kendala atau penyebab dilakukannya kegiatan ini dikarenakan adanya perubahan komposisi anggaran di Pemerintah Daerah.
 - 2) Penggalian potensi Wajib Pajak sektor tertentu (Rumah Sakit, Emas, Perkebunan, Peternakan, dan SPBU) untuk menunjang penerimaan pajak yang lebih optimal
- b. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
 - 1) Adanya isu Wajib Pajak baru yang masih belum terjangkau kebaruannya sehingga dilakukan kegiatan jemput bola dengan memberi edukasi dan penyuluhan terkait kewajiban perpajakannya secara berkala karena tersebar lokasi tempat kerja Wajib Pajak.
 - 2) Rendahnya kontribusi Wajib Pajak besar cabang untuk menunjang persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Sehingga dilakukan penambahan Wajib Pajak ekstensifikasi dan KPDL serta DSE untuk Wajib Pajak cabang.
- c. IKU Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
 - 1) Untuk menunjang persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), upaya yang dilakukan berupa pengiriman surat imbauan diluar SP2DK untuk data matching yang telah ada setoran namun belum dilaporkan.
- d. IKU Pengujian kepatuhan material yang efektif
 - 1) Adanya isu utama yaitu Wajib Pajak memiliki Ability To Pay yang rendah, selain itu terdapat Wajib Pajak yang memiliki Ability To Pay tinggi namun Will To Pay yang rendah. Sehingga untuk menunjang persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan maka dilakukan Penyusunan DSP4 Kolaboratif (Adjustment) serta Penerbitan Surat Pemanggilan Konseling SP2DK Outstanding dan Kegiatan Visit Lapangan.

5. Analisis Rencana Aksi dan Mitigasi Risiko Tahun 2024 dan Tahun 2025

- a. Di tahun 2024 KPP Pratama Lhokseumawe membuat rencana aksi mitigasi risiko melalui Manajemen Risiko (MR) yang dibuat menggunakan aplikasi Periskop. Adapun mitigasi risiko dari beberapa risiko yang terjadi di tahun 2023 berupa:
Di tahun 2023 terdapat IKU yang tidak tercapai yaitu penguatan pengelolaan keuangan yang optimal. Sehingga di tahun 2024 kami memitigasi risiko tersebut melalui Manajemen Risiko (MR), kami membuat rencana aksi/mitigasi dengan melakukan evaluasi kinerja KPP dengan mencari faktor/penyebab dominan atas penurunan kinerja yang belum optimal..
Kegiatan yang dilakukan dari mitigasi risiko yang dibuat berupa melakukan evaluasi melalui rapat Board of Director dan Dialog Kinerja Organisasi.

Dari mitigasi risiko yang sudah dilaksanakan dengan target 4 kali selama setahun ini terbukti efektif dan efisien sehingga membuahkan hasil yang optimal dan di tahun 2024 untuk IKU yang sama menjadi tercapai.

- b. Selain IKU kantor yang perlu dimitigasi terdapat juga 2 risiko berdasar arahan dari kantor pusat yang harus dilaksanakan mitigasinya. Adapun risiko sebagai berikut:
- 1) Kapasitas yang dimiliki pegawai tidak mampu mendorong output/ target kinerja yang ditetapkan. Mitigasi yang dilakukan untuk kejadian risiko ini yaitu melaksanakan sosialisasi dan pendampingan sharing session dari pegawai yang telah berhasil kepada para pegawai yang mengikuti ujian kompetensi atau assessment, dalam hal ini Board of Director juga mendukung melalui program BoD mengajar, dimana pejabat administrator dan para pejabat pengawas KPP Pratama Lhokseumawe melakukan ToK untuk Pegawai sesuai dengan bidang yang diperlukan masing-masing.
 - 2) Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum. Risiko ini merupakan risiko turunan dari kantor pusat yang diamanahkan kepada KPP untuk dilaksanakan mitigasi risikonya. Adapun mitigasi risiko dari risiko ini yaitu melakukan sosialisasi antikorupsi dan penguatan integritas pegawai serta melaksanakan kegiatan Komitmen Integritas Pimpinan (KIP).
 - 3) Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi. Risiko ini juga merupakan turunan dari kantor pusat yang diamanahkan kepada KPP untuk dilaksanakan mitigasi risikonya. Adapun mitigasi risiko yang dibuat yaitu meningkatkan ketertiban pegawai tentang kode etik dan kode perilaku, clean desk policy, dan ketentuan jam kerja.
 - 4) Rendahnya nilai SMART (Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu) DJA yang mempengaruhi capaian kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Risiko ini merupakan risiko turunan dari kantor pusat yang diamanahkan kepada KPP untuk dilaksanakan mitigasi risikonya. Adapun mitigasi risiko yang dibuat yaitu melaksanakan sharing session KPP yang berhasil dalam pengelolaan dan pelaksanaan penggunaan anggaran, Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran setiap triwulan untuk mengukur capaian IKPA serta optimalisasi capaian SMART. Kegiatan yang dilaksanakan berupa membahas dan mengevaluasi secara berkala melalui rapat Board of Director dan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi, selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan melalui rapat khusus tim keuangan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sangat baik sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Presentase realisasi anggaran terbesar terdapat pada akun 52 yakni belanja barang dengan jumlah Rp.5,291,354,152, komponen belanja terbesar kedua adalah pada akun 51 yakni belanja pegawai dengan nilai Rp.739.802.000, dan realisasi belanja terkecil terdapat pada belanja modal akun 53 belanja modal dengan nilai Rp.203.437.161.

- 1 Realisasi belanja barang yang menempati realisasi belanja terbesar di KPP Pratama Lhokseumawe dengan nilai Rp.5,291,354,152 meliputi :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas dimanfaatkan oleh pegawai untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik berupa mengumpulkan data perpajakan, meminta penjelasan atas data/keterangan dalam rangka ekstensifikasi, melakukan layanan dan konsultasi perpajakan, melakukan penagihan aktif, melakukan pemeriksaan dan audit penerimaan, serta belanja dinas operasional lainnya
 - b. Belanja Barang/Bahan/Jasa

Belanja Barang/Bahan/Jasa berupa belanja kudapan, makan siang, pembuatan spanduk/baliho, dan seminar kit yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi kepada Wajib Pajak. Belanja jasa berupa pemanggilan narasumber untuk menguatkan nilai-nilai dan pengetahuan wajib pajak terkait bisnis, ekspor-impor, ketentuan, dan sebagainya. Belanja Barang Non Operasional lainnya yang dimanfaatkan untuk program pembelajaran melalui In House Training (IHT) dan penguatan nilai persatuan dan kesatuan dilingkup KPP Pratama Lhokseumawe melalui kegiatan Internal Corporate Value (ICV).
 - c. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor digunakan sebagai program dukungan manajemen meliputi belanja untuk mendukung honorarium PPNPN, belanja keperluan kantor sehari-hari, belanja pengiriman surat dinas melalui pos, honorarium pengelola keuangan, belanja langganan listrik dan air, dan belanja pemeliharaan gedung, peralatan, mesin, kendaraan.
- 2 Realisasi belanja pegawai yang menempati realisasi belanja terbesar di KPP Pratama Lhokseumawe dengan nilai Rp739,802,000 meliputi :
 - a. Belanja Lembur

Selama tahun 2024, belanja uang lembur digunakan secara selektif dengan memperhatikan tujuan dan manfaat dari kegiatan lembur. Pada tahun 2024 beberapa kegiatan yang membutuhkan lembur antara lain kegiatan pemusnahan arsip berkas untuk berkas yang sudah daluwarsa. Selanjutnya, uang lembur juga digunakan untuk melakukan kegiatan non efektif wajib pajak secara jabatan terhadap wajib pajak yang telah diusulkan oleh Account Representative.
 - b. Belanja Uang Makan

Belanja uang makan PNS dibayarkan setiap bulannya kepada pegawai KPP Pratama Lhokseumawe sesuai masing-masing alokasi pagu uang makan PNS golongan II, golongan III, dan golongan IV.

3 Realisasi Belanja pada akun belanja modal 53 dengan nilai Rp.203.437.161 meliputi:

a. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Belanja modal untuk perangkat pengolah data dan komunikasi yang dilakukan pada tahun 2024 antara lain proyektor, speaker dan microfon (perangkat audio).

b. Peralatan Fasilitas Perkantoran

Belanja modal peralatan fasilitas perkantoran yang dilakukan pada tahun 2024 antara lain pembelian kursi dan meja kerja pegawai, AC Split, dan pembenahan meja, kursi dan fasilitas penunjang layanan lainnya pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Lhokseumawe pada tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2024 dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nota Dinas Sekretariat Direktorat Jenderal dan nota dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 06 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa:

- 1 Capaian kinerja penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe Tahun 2024 adalah sebesar Rp.720.888.824.678. Surplus sebesar 1.798.597.678 atau 0,25% dari target yaitu sebesar Rp. 719.090.227.000.; dan
- 2 Secara keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan maksimal;
- 3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe berkomitmen untuk tetap memberikan kinerja maksimal dalam melaksanakan tugas di tahun 2025 dengan segenap potensi dan tantangan yang ada.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai tujuan, sasaran dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe sehingga dapat memberikan feedback untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja periode yang akan datang

Lhokseumawe, 30 Januari 2025

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Lhokseumawe



Ditandatangani secara elektronik
Dian Alpha Aviantara



Lampiran

Penghargaan berhasil meraih predikat Kantor Pelayanan Terbaik Peringkat 2 Kantor Wilayah DJP Aceh.



Penghargaan ini diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh Bapak Paryan atas prestasi sebagai Kantor Pelayanan terbaik peringkat 2 tingkat Kantor Wilayah DJP Aceh.

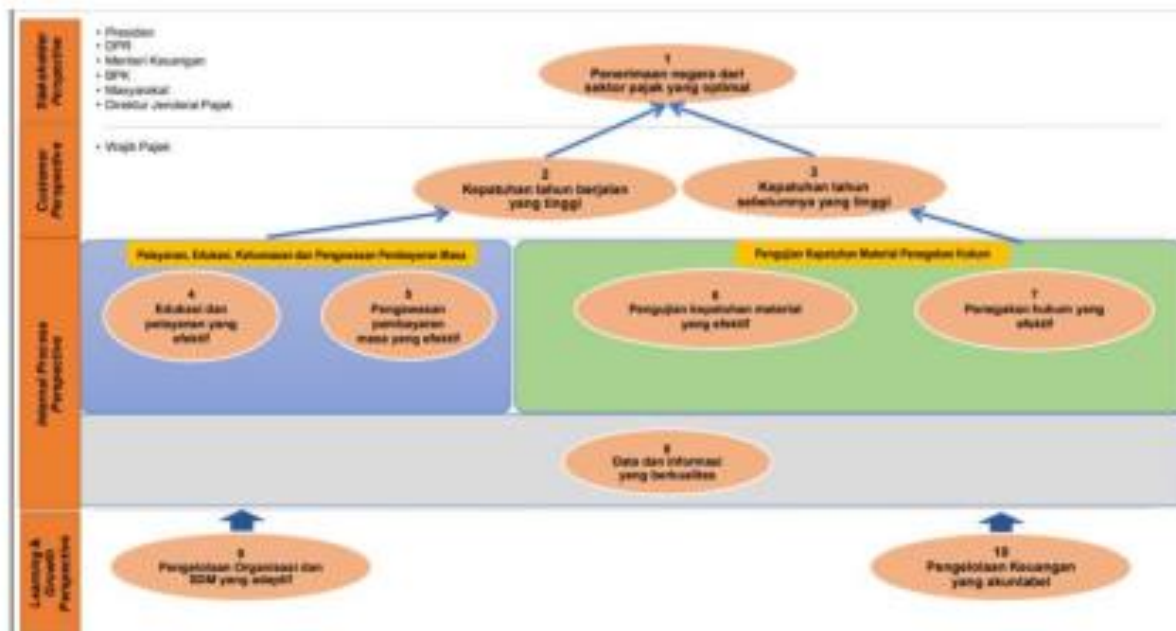


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-8/WPJ.25/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA LHKSEUMAWE
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LHOKSEUMAWE
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran	
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara		Rp	1.457.768.000
1.	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	790.779.000
2.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	275.971.000
3.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	391.018.000
B. Program Dukungan Manajemen		Rp	4.844.014.000
1.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	4.037.340.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	806.674.000
Total		Rp	6.301.782.000

Plt. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Aceh,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arridel Mindra

Lhokseumawe, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Lhokseumawe,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sutanto Agustiono



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LHOSEUMAWE
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	16%	45%	45%	73%	73%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	16%	45%	45%	73%	73%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Lhokseumawe, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Lhokseumawe,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sutanto Agustiono